

RECRUITMENT DAN KEWENANGAN YUDIKATIF NEGARA INDONESIA DENGAN VIETNAM

Evi Rahmatin¹, Intansari², Dian Eka Prastiwi³

vievivirahmatinevivi@gmail.com¹, intansari04221@gmail.com², dosen01204@unpam.ac.id³

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan sistem perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif antara Indonesia dan Vietnam, dengan fokus pada persamaan, perbedaan, serta tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, sementara Vietnam mengadopsi sistem satu partai yang efisien namun kurang transparan. Di sektor ketenagakerjaan, tantangan seperti pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan menjadi isu utama, sedangkan dalam kewenangan yudikatif, korupsi dan intervensi politik menghambat independensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research untuk menganalisis hubungan antara struktur politik, efektivitas perekrutan tenaga kerja, dan kewenangan yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi bilateral dan reformasi sistemik untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan berdaya saing.

Kata Kunci: Perekrutan Tenaga Kerja, Kewenangan Yudikatif, Indonesia, Vietnam.

ABSTRACT

This research discusses the comparison of labor recruitment systems and judicial authority between Indonesia and Vietnam, with a focus on the similarities, differences and challenges faced by each country. Indonesia implements a democratic system that provides space for public participation, while Vietnam adopts a one-party system that is efficient but less transparent. In the employment sector, challenges such as unemployment and skills mismatch are the main issues, while in the judiciary, corruption and political interference hinder independence. This research uses a qualitative approach based on library research to analyze the relationship between political structure, effectiveness of labor recruitment, and judicial authority. The research results show the importance of bilateral collaboration and systemic reform to create fair, transparent and competitive policies.

Keywords: Labor Recruitment, Judicial Authority, Indonesia, Vietnam.

PENDAHULUAN

Sistem perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif merupakan aspek penting dalam pembentukan suatu negara hukum yang demokratis. Di Indonesia dan Vietnam, dua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sistem ini memiliki perbedaan dan persamaan yang mencerminkan karakteristik sosial, politik, dan hukum masing-masing. Sebagai negara dengan sistem hukum yang unik, Indonesia mengadopsi model hukum campuran yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda, hukum adat, dan hukum agama. Sebaliknya, Vietnam menerapkan sistem hukum sosialis yang berbasis pada prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme. Perbedaan fundamental ini menjadi titik awal untuk membandingkan bagaimana kedua negara tersebut merancang mekanisme perekrutan tenaga kerja dan mengatur kewenangan yudikatif dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan.

Dalam konteks perekrutan tenaga kerja, Indonesia menempatkan tenaga kerja sebagai elemen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Sistem perekrutan diatur melalui regulasi ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan hak-hak pekerja, sistem outsourcing, hingga upaya pengentasan pengangguran. Di sisi lain, Vietnam, sebagai negara dengan ekonomi berbasis komando yang perlahan bertransisi menuju pasar terbuka, memiliki kebijakan perekrutan yang masih terkonsentrasi pada sektor publik dan usaha kecil

menengah. Perbandingan ini menyoroti bagaimana perbedaan sistem politik kedua negara memengaruhi cara mereka merekrut dan mengelola tenaga kerja.

Sementara itu, kewenangan yudikatif di Indonesia diatur melalui prinsip trias politica, di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Sebaliknya, di Vietnam, kewenangan yudikatif berada di bawah kendali Partai Komunis, yang menjadi pilar utama dalam menentukan arah kebijakan hukum. Meskipun berbeda secara struktural, kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, seperti independensi lembaga yudikatif, tekanan politik, dan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus besar.

Perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan internasional kedua negara tersebut. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki komitmen untuk meningkatkan kerja sama regional, termasuk dalam harmonisasi hukum dan perlindungan tenaga kerja lintas negara.

Namun, dalam praktiknya, kedua negara masih memiliki kendala dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan kerangka kerja regional. Hal ini menciptakan peluang untuk melakukan kajian komparatif yang mendalam guna memahami pendekatan masing-masing negara dalam mengelola tantangan hukum dan tenaga kerja.

Selain itu, perspektif sejarah juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Vietnam. Indonesia, yang memiliki sejarah panjang penjajahan oleh Belanda, cenderung memiliki sistem hukum yang berakar pada tradisi Eropa. Vietnam, dengan sejarah kolonial Prancis dan pengaruh kuat dari Uni Soviet, membangun sistem hukumnya berdasarkan ideologi sosialis. Hal ini turut memengaruhi bagaimana hukum dirancang, termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif.

Upaya reformasi hukum di kedua negara juga menjadi isu penting dalam pembahasan ini. Di Indonesia, reformasi hukum pasca- Orde Baru telah mendorong desentralisasi dan independensi lembaga yudikatif.

Di Vietnam, reformasi hukum dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertahankan kontrol politik oleh Partai Komunis. Perbandingan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika hukum di masing-masing negara tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur politik memengaruhi keberhasilan reformasi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian komparatif hukum di Asia Tenggara. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, pembuat kebijakan di Indonesia dan Vietnam dapat saling belajar dan berkolaborasi dalam membangun sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi relevan untuk memahami bagaimana perbedaan sistem hukum dapat memengaruhi kinerja tenaga kerja dan stabilitas sosial di kedua negara.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aspek-aspek spesifik dalam perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif di Indonesia dan Vietnam.

Pendekatan komparatif akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik terbaik (best practices) yang dapat diadopsi oleh kedua negara untuk memperkuat sistem hukum dan ketenagakerjaan mereka.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait perekrutan tenaga kerja dan

kewenangan yudikatif di Indonesia dan Vietnam. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara komparatif untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan antara kedua negara, serta memahami pengaruh struktur politik dan hukum terhadap kebijakan perekrutan tenaga kerja dan independensi kewenangan yudikatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menginterpretasikan data, dengan fokus pada teori hukum dan sistem pemerintahan sebagai kerangka analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perbedaan dan persamaan sistem perekrutan tenaga kerja antara Indonesia dan Vietnam?

Sistem perekrutan tenaga kerja di Indonesia dan Vietnam memiliki landasan hukum yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk mendukung pembangunan ekonomi. Di Indonesia, sistem perekrutan diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup ketentuan tentang hak-hak pekerja, sistem outsourcing, dan perlindungan pekerja. Sementara itu, Vietnam mengatur perekrutan tenaga kerja melalui Labour Code yang mengalami pembaruan signifikan pada tahun 2019 untuk mengakomodasi transisi menuju ekonomi berbasis pasar yang lebih modern.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada tingkat liberalisasi sistem ketenagakerjaan. Di Indonesia, sektor swasta memegang peranan penting dalam perekrutan tenaga kerja, dengan fokus pada pengembangan sektor industri dan jasa. Sebaliknya, Vietnam masih mempertahankan peran dominan pemerintah dalam perekrutan, terutama di sektor publik. Kendati demikian, Vietnam telah mulai membuka kesempatan lebih luas bagi sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Persamaan lainnya adalah upaya kedua negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti otomatisasi dan pandemi. Baik Indonesia maupun Vietnam telah memperkenalkan kebijakan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja mereka menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Kebijakan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memprioritaskan kesejahteraan tenaga kerja mereka.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan. Di Indonesia, masalah sering muncul terkait dengan pelanggaran hak pekerja seperti pembayaran upah yang tidak sesuai standar. Di Vietnam, kendala utama adalah minimnya kapasitas institusi pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap Labour Code. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengawasan di kedua negara agar regulasi ketenagakerjaan dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, baik Indonesia maupun Vietnam menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja migran. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, sering menghadapi masalah seperti eksploitasi pekerja migran di luar negeri. Di sisi lain, Vietnam juga mengalami kendala serupa, terutama bagi tenaga kerja migran mereka di kawasan Asia Timur. Hal ini mendorong kedua negara untuk memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan tenaga kerja migran.

Aspek budaya juga menjadi faktor penting dalam perekrutan tenaga kerja di kedua negara. Di Indonesia, nilai-nilai budaya lokal sering kali memengaruhi hubungan antara pengusaha dan pekerja. Sementara di Vietnam, budaya kerja kolektif yang dipengaruhi oleh ideologi Marxisme-Leninisme masih mendominasi pola kerja di beberapa sektor. Perbedaan ini menciptakan pendekatan yang unik dalam mengelola hubungan industrial di masing-masing negara.

Kedua negara juga telah berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja mereka melalui

pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah Indonesia dan Vietnam sama-sama memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional mereka. Program pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di pasar global.

Dengan memahami perbedaan dan persamaan tersebut, pembuat kebijakan di Indonesia dan Vietnam dapat saling belajar untuk memperbaiki sistem perekrutan tenaga kerja masing-masing. Kolaborasi antara kedua negara juga dapat dilakukan dalam bentuk berbagi praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam perekrutan tenaga kerja.

Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menjaga independensi kewenangan yudikatif?

Independensi kewenangan yudikatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang demokratis. Di Indonesia, tantangan utama dalam menjaga independensi ini adalah adanya intervensi politik dalam pengambilan keputusan yudikatif. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tekanan politik masih memengaruhi keputusan di beberapa kasus besar, terutama yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi.

Vietnam, di sisi lain, menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena sistem yudikatifnya berada di bawah pengaruh kuat Partai Komunis. Dalam sistem ini, keputusan yudisial sering kali dipandu oleh kebijakan partai, sehingga independensi hakim menjadi terbatas. Meskipun demikian, Vietnam telah mengambil langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan profesionalisme hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala signifikan bagi kedua negara. Di Indonesia, jumlah hakim yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, sehingga menimbulkan penundaan penyelesaian kasus. Sementara di Vietnam, pelatihan hakim dan staf pengadilan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kompetensi dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Korupsi dalam sistem yudikatif menjadi isu yang tidak kalah penting. Di Indonesia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pengadilan telah mencoreng integritas lembaga yudikatif. Vietnam juga menghadapi tantangan serupa, meskipun pemerintah telah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk peradilan.

Tekanan sosial dan media juga turut memengaruhi independensi hakim di kedua negara. Di era digital, opini publik yang berkembang di media sosial sering kali memberikan tekanan terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini menciptakan dilema bagi hakim untuk tetap independen tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat.

Kedua negara juga menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan. Di Indonesia, upaya ini masih terbatas pada beberapa jenis kasus tertentu, seperti kejahatan anak. Di Vietnam, penerapan prinsip ini masih dalam tahap awal, dengan fokus pada pengembangan mekanisme mediasi yang lebih inklusif.

Selain itu, akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal tetap menjadi tantangan. Di Indonesia, biaya pengadilan yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Vietnam menghadapi kendala serupa, dengan keterbatasan lembaga bantuan hukum yang dapat melayani masyarakat kurang mampu.

Untuk mengatasi tantangan ini, kedua negara perlu terus mendorong reformasi hukum yang berfokus pada penguatan independensi lembaga yudikatif. Langkah-langkah seperti

peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan hakim menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan terpercaya.

Bagaimana pengaruh struktur politik terhadap efektivitas perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif di Indonesia dan Vietnam?

Struktur politik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif di Indonesia dan Vietnam. Sebagai negara demokratis, Indonesia mengadopsi sistem politik yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk serikat pekerja dan lembaga masyarakat sipil. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan tantangan dalam menyelaraskan kepentingan berbagai pihak.

Sebaliknya, Vietnam, dengan struktur politik berbasis sistem satu partai, memiliki kendali yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah Vietnam dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan yang dianggap strategis tanpa banyak hambatan politik. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Struktur politik juga memengaruhi cara kedua negara mengatur kewenangan yudikatif. Di Indonesia, meskipun sistem politik memberikan independensi formal kepada lembaga yudikatif, tekanan politik dari partai atau kelompok tertentu masih sering terjadi. Vietnam, di sisi lain, memiliki sistem politik yang terintegrasi dengan sistem hukum, sehingga pengaruh Partai Komunis sangat kuat dalam proses peradilan.

Efektivitas perekrutan tenaga kerja di kedua negara juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang bersifat politis. Di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari aktor politik tertentu, seperti kelompok bisnis besar. Di Vietnam, kebijakan ketenagakerjaan lebih terpusat pada pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan oleh partai.

Dalam konteks kewenangan yudikatif, struktur politik memengaruhi kemampuan lembaga yudikatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk menguji kebijakan eksekutif melalui Mahkamah Konstitusi. Di Vietnam, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah cenderung bersifat internal, sehingga independensi pengawasan menjadi lebih terbatas.

Struktur politik yang berbeda juga berdampak pada hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha. Di Indonesia, hubungan ini diatur melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Di Vietnam, hubungan ini lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik.

Selain itu, struktur politik memengaruhi tingkat kepastian hukum dalam perekrutan tenaga kerja. Di Indonesia, sering terjadi perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Di Vietnam, kebijakan cenderung lebih stabil tetapi kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Untuk meningkatkan efektivitas perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif, kedua negara perlu memperkuat struktur politik mereka dengan cara yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien.

KESIMPULAN

Perekrutan tenaga kerja dan kewenangan yudikatif di Indonesia dan Vietnam menunjukkan perbedaan dan persamaan yang mencerminkan karakteristik masing-masing negara. Indonesia dengan sistem politik demokratis memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan Vietnam dengan

sistem satu partai mampu mengimplementasikan kebijakan secara cepat namun memiliki keterbatasan dalam transparansi. Tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan keterbatasan sumber daya memengaruhi efektivitas sistem di kedua negara.

Namun, komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja dan reformasi peradilan menunjukkan upaya kedua negara dalam memperbaiki sistem mereka guna mendukung pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Untuk meningkatkan kualitas perekrutan tenaga kerja dan independensi kewenangan yudikatif, Indonesia dan Vietnam perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang ketenagakerjaan, kedua negara dapat memperluas pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten.

Sedangkan dalam sektor yudikatif, upaya peningkatan kompetensi hakim dan pengawasan terhadap praktik korupsi perlu menjadi prioritas. Selain itu, kolaborasi bilateral antara kedua negara dalam berbagi praktik terbaik dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem yang lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, R., & Suparman, A. (2019). "Perekrutan Tenaga Kerja dan Tantangannya dalam Era Globalisasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 45-56.
- Nugroho, A., & Hartono, F. (2019). "Korupsi dalam Sistem Yudikatif: Tantangan dan Solusi di Indonesia dan Vietnam." *Jurnal Integritas Hukum*, 7(2), 56-69.
- Pratama, H., & Dewi, N. L. (2020). "Perbandingan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dan Vietnam: Studi Kasus pada Sektor Manufaktur." *Jurnal Hubungan Industrial*, 12(3), 89-101.
- Rahayu, P., & Setiawan, B. (2021). "Peran Kepemimpinan dalam Pengelolaan Tenaga Kerja Multikultural di ASEAN." *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 10(4), 78-91.
- Sari, M. P., & Wijaya, R. (2020). "Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Vietnam: Studi Literatur." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 67-80.
- Widodo, T. S., & Susilo, H. (2022). "Pengaruh Struktur Politik terhadap Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(3), 112-126.
- Yulianto, D. (2018). "Analisis Independensi Kewenangan Yudikatif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(1), 23-37.